BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beracara di muka pengadilan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian dalam HIR/RBG terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Pasal 123 HIR/147 RBG menentukan : (1) kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seseorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Namun demikian dalam Pasal 58 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.¹

Berdasarkan Pasal 1792 BW (*Burgerlijk Wetboek*), pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum, maka Pasal 123 HIR/147 R. Bg mengatur bahwa pemberian kuasa idealnya

¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta,2013), hlm 23

dilakukan secara tertulis, akan tetapi tidak tertutup jika dilakukan secara lisan (Pasal 1793 BW), sehingga orang-orang tertentu yang disebut diatas lalu dapat berwenang bertindak dan memenuhi syarat-syarat serta berkapasitas dan berkualitas sebagai "*legitima persona standi in judicio*".²

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak berbicara dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, maka si pemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu, misalnya karena adanya perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon prinsipalnya. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama-sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.³

Jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonan oleh pemohon, maka tentu akan timbul kesulitan. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh

²R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 36

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 199

kuasa, dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua majelis yang akan mempertimbangkan apakah kepadanya perlu diberikan kesempatan berbicara atau tidak.⁴

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Pemberi bantuan hukum ini diberikan wewenang untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Selain berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, Advokat memang telah memiliki legitimasi untuk memberikan bantuan hukum dan dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian sudah lazim bila seorang advokat memberikan bantuan hukum dan beracara dalam persidangan sebuah perkara. Hal ini tentu berbeda dengan posisi paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang hanya mendasarkan wewenang pemberian bantuan hukumnya pada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, sehingga tidak lazim menemukan ketiganya bersidang dalam sebuah persidangan

Keterlibatan kuasa hukum selain advokat seperti, paralegal, mahasiswa fakultas hukum dan lain-lain kerap mengalami kendala. Tidak sedikit hakim dan penegak hukum lainnya yang menolak para pemberi bantuan hukum selain advokat untuk mendampingi proses peradilan dan beracara dalam sebuah

⁴*Ibid*, hlm 200

persidangan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pati, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati diminta oleh Penggugat untuk memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya melalui surat kuasa khusus untuk menjauhkan gugatan cerai kepada tergugat. .

Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, membiarkan/tidak memperdulikan penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat sebagai isterinya, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan silaturahmi yang baik diantara keduanya. Dalam eksepsinya tergugat menggugat balik penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kuasa hukum penggugat belum memiliki kualitas hukum untuk mewakili penggugat dalam persidangan dikarenakan belum pernah bersumpah di sidang terbuka , sehingga belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan tersebut. Sehingga hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima⁵. Dalam tingkat banding atas permohonan penggugat, putusan Pengadilan Agama Pati tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg dan menyatakan permohonan banding dapat diterima dan menyatakan kuasa hukum yang menjadi wakil penggugat dapat beracara dipersidangan dengan alasan bahwa untuk kepentingan magang,calon advokat pemegang ijin dapat

⁵Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt

diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping.⁶

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pendapat hakim terkait kuasa hukum selain advokat yang beracara dalam persidangan dan dasar hukum Hakim yang digunakan demi memutuskan hukum jika dihadapkan dengan permasalahan seperti kasus diatas.

Penulis telah melakukan obsevasi di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang di Pengadilan tersebut pernah menerima perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum selain advokat. Dari hasil observasi tersebut penulis mendapatkan bahwa ada beberapa hakim yang tidak menerima apabila kuasa hukum tersebut bukan dari advokat, namun ada juga hakim yang berpendapat kuasa hukum selain advokat dapat beracara dipersidangan namun harus didampingi oleh advokat yang memiliki izin untuk beracara dipersidangan. Adanya perbedaan pendapat para Hakim mengenai kuasa hukum tersebut penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Hakim Tentang Peran dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam Beracara di Pengadilan Agama”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁶Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 085/Pdt.G/2014/PTA.Smg

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara di Pengadilan Agama?
2. Apa Dasar Hukum Persepsi Hakim Pengadilan Agama mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim pengadilan agama terhadap peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui dasar hukum persepsi hakim pengadilan agama terhadap peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara di Pengadilan Agama

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.

3. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya⁷. Pendapat yang penulis maksud disini adalah pendapat hakim Pengadilan mengenai pemberi bantuan hukum selain advokat.
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman⁸. Disini penulis mewawancarai 4 orang hakim
3. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁹ Fungsi adalah jabatan (yang dilakukan), pekerjaan yang dilakukan.¹⁰ Namun Penulis dan Hakim disini menyamakan antara peran dan fungsi pemberi bantuan hukum yang mengacu pada pada Pasal 4 ayat

⁷Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, ed III*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2003), hal. 91

⁸Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jaudar Press, 2017) hlm. 22

⁹*Ibid*, hlm 870

¹⁰*Ibid*, hlm 332

(3) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

4. Pemberi bantuan hukum yaitu Advokat/Penasihat Hukum, Posbakum, LBH,dan pekerja sosial/Pendamping.¹¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa pemberi bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
5. Advokat adalah Seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan.¹² Dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar undang-undang ini. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemberi bantuan hukum selain advokat seperti paralegal, dosen, Mahasiswa fakultas hukum dan lain sebagainya.
6. Beracara adalah memakai acara dengan acara, sedang memeriksa dan mempertimbangkan perkara¹³. Beracara yang penulis maksud disini adalah melaksanakan prosedur persidangan.

¹¹Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalemedia, 2016), hlm.32

¹²Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*,(Jogjakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 1

¹³Poerdarminta, *Op. Cit.*, hlm 4

7. Pengadilan Agama : Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Disini penulis hanya membatasi pada perkara yang ada di Pengadilan Agama saja.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, dalam kajian sebelumnya penulis menemukan penelitian yang membahas tentang:

1. **Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif *Fiqh Murafa'at* (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)**” oleh Dwi Novitasari (NIM C33209006) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah. Penelitian tersebut membahas tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan menurut perspektif *Fiqh Murafa'at*.¹⁴
2. **“ Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”** oleh Iwan Wahyu Pujiarto, USU Law journal, agustus 2015. Jurnal tersebut membahas

¹⁴Dwi Novitasari, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa'at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)*(IAIN Sunan Ampel).

tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum serta beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum tersebut.¹⁵

Dari skripsi dan jurnal di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah tersebut berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih menjurus ke pendapat hakim Pengadilan tentang bantuan hukum yang diberikan selain advokat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang terdiri dari kuasa, pengertian kuasa, jenis kuasa dan berakhirnya kuasa, bantuan hukum, dan macam-macam bantuan hukum.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian.

¹⁵Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (USU Law Journal, 2015)

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, yaitu hasil penelitian wawancara terhadap responden mengenai persepsi masing-masing responden kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran, yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.